

## Warga Harus Waspada Letusan Susulan Lokon



Gunung Lokon kembali mengeluarkan dua kali letusan pada Sabtu (16/7) pukul 02.47 dan 5.15 WITA. Kedua letusan tersebut mengeluarkan asap kelabu tebal yang meluncur hingga ketinggian masing-masing 800 dan 300 meter dari kawah Tompaluan.

Masih tingginya aktivitas itulah yang membuat status Lokon belum dapat diturunkan, yakni masih pada level awas. "Aktivitas Lokon masih tetap tinggi level 4, statusnya belum diturunkan," kata Sutopo Purwo Nugroho Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya pada 01.00 WITA, di Posko Bencana Letusan Gunung Lokon di Tomohon Sulawesi Utara dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BNPB didampingi Deputi Penanganan Darurat dan Inspektur Utama BNPB bersama Kepala PVMBG, Sekda Tomohon, Kepala BPBD Sulut, dan instansi terkait.

Koordinasi dilakukan guna lebih mengintensifkan penanganan pengungsi dan penanganan tanggap darurat. Mengingat jumlah pengungsi terus mengalir dan sudah mencapai 4.836 orang atau 1.325 KK. Menurut Sutopo, kawasan Rawan Bencana (KRB) I berada di radius 5 kilometer dari potensi jatuhnya batu pijar dan debu pekat. Sedangkan KRB II berada di radius 3,5 kilometer dari potensi awan panas dan lahar.

"Di KRB 1 terdapat sekitar 28 ribu orang dan KRB 2 sekitar 12 ribu orang," terangnya. Penanganan tanggap darurat telah dilakukan oleh BPBD Kota Tomohon dengan didukung

BNPB dan BPBD Sulut, serta instansi terkait. BNPB, kata Sutopo, telah memberikan bantuan dana siap pakai sebesar 300 juta rupiah, logistic, dan peralatan senilai 200 juta rupiah, ditambah dengan pendampingan personel.

Hingga hari ketiga setelah letusan pertama, tidak ada korban jiwa yang terdampak langsung akibat erupsi. Satu orang tercatat meninggal dunia pada pukul 23.15 WITA 12 Juli 2011, namun disebabkan serangan jantung dan jatuh di kamar mandi.

Rapat Koordinasi Dalam rapat koordinasi, Kepala BNPB, Syamsul Ma arif memberikan arahan bahwa penanganan bencana menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan bantuan masyarakat dan dunia usaha demi kemanusiaan.

Ditambahkannya, penanganan bencana harus sesuai standar operasional yang ada dikombinasikan dengan nilai nilai kearifan lokal masyarakat setempat. "Gunakan local wisdom, cultural wisdom, dan spiritual wisdom. Masyarakat secara tangguh mampu melakukan sendiri hal-hal yang kecil di lingkungan pengungsi," papar Syamsul.

Hal tersebut, katanya, sesuai dengan semangat Mapalus, yaitu semangat gotong royong cara Minahasa, yang juga dapat dijadikan senjata melawan tindak kriminal.

"Terkait dengan konteks pengungsi bencana, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah harus saling bergotong royong untuk memecahkan permasalahan mereka sendiri dengan sumberdaya lokal yang ada sebelum memutuskan untuk meminta bantuan dari luar," terangnya.

Menurut Syamsul, Mapalus ini bisa diterapkan di tempat pengungsi. Misal membangun WC, membersihkan lingkungan pengungsian, dapur umum, membagi makanan, minuman dan sebagainya bisa dilakukan secara bersama.

"Tidak semuanya menunggu pemerintah atau relawan yang melakukan. Meskipun pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," pungkasnya.